



Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Penyerapan Anggaran

ALIFIA HARFIANI LEMANA, DWI HANDARINI, INDRA PAHALA
Universitas Negeri Jakarta
Email : harfiani.alifia14@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the effect of goods / services procurement, bureaucratic reform, public accountability, and the Government Internal Control System (SPIP) on budget absorption in Ministries and State Institutions in Indonesia. This research was conducted with quantitative methods through multiple linear regression analysis to see the effect of independent variables on the dependent variable and robustness tests to test the robustness of the model used. The results showed that public accountability has a significant effect on budget absorption, indicating that transparency and public accountability encourage the effectiveness of budget management. In contrast, the procurement of goods / services, bureaucratic reform, and SPIP had no significant effect on budget absorption. This is due to the revision of the Budget Implementation List (DIPA), bureaucratic reforms that focus more on administrative efficiency, and the implementation of Government Internal Control System that is not yet optimal. The results of this study are expected to provide insights for policy makers in improving budget absorption in the government sector.

Keywords: Procurement of Goods/Services; Bureaucratic Reform; Public Accountability; Government Internal Control System; Budget Absorption.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengadaan barang/jasa, reformasi birokrasi, akuntabilitas publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap penyerapan anggaran di Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran yang membuktikan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban publik mendorong efektivitas pengelolaan anggaran. Sebaliknya, pengadaan barang/jasa, reformasi birokrasi, dan SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini disebabkan oleh revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), reformasi birokrasi yang lebih berfokus pada efisiensi administrasi, serta implementasi SPIP yang belum optimal.



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan evaluasi serta dasar bagi pengambil kebijakan dalam melakukan perencanaan strategi yang lebih efektif demi meningkatkan penyerapan anggaran di lingkungan pemerintahan.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa; Reformasi Birokrasi; Akuntabilitas Publik; SPIP; Penyerapan Anggaran

1. INTRODUCTION

Indonesia saat ini ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di setiap tahunnya (Kompas.com, 2024). Hal ini dinyatakan oleh Presiden terpilih periode 2024 – 2029 yang memberikan target perekonomian 8% secara tahunan dalam visi misinya, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sepuluh tahun terakhir. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi adalah penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran adalah salah satu parameter untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mendorong roda perekonomian (Sulistiyowati et al., 2022). Realisasi belanja dapat menggambarkan kebijakan serta arah pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah (Lamaya & Mei, 2021). Dengan demikian, penyerapan anggaran harus dilaksanakan secara optimal agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Penyerapan anggaran merupakan realisasi atau jumlah pengeluaran belanja dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai program dan kegiatan pemerintah. Penyerapan anggaran dari masing-masing Kementerian/Lembaga di Indonesia sangat berperan penting sebagai indikator keberhasilan pengalokasian APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Gambaran keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan perencanaan anggaran dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggaran (Safpremi & Annie, 2022). Penyerapan Anggaran dimuat dalam laporan keuangan pada bagian Laporan Realisasi Anggaran yang berupa perbandingan angka perencanaan dengan realisasinya. Data penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga di Indonesia pada tahun 2019-2023 disajikan pada gambar 1.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan K/L Tahun Anggaran 2018-2023

Gambar 1. Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga di Indonesia

Berdasarkan laporan keuangannya, angka penyerapan anggaran pada masing-masing Kementerian/Lembaga Indonesia sangat fluktuatif. Dalam kurun waktu 2018-2023 angka penyerapan anggaran berada di angka 100% bahkan lebih hanya terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan oleh pandemi sehingga belanja K/L bertambah. Selain tingkat penyerapan tahunannya yang belum maksimal, masalah lain juga terletak pada ketidakmerataan penyerapan anggarannya, pemakaian anggaran belanja masih kurang efektif pada awal tahun, kemudian melonjak di akhir tahun (Kuntadi et al., 2022). Permasalahan seperti ini harus segera diatasi karena memiliki potensi untuk menghambat proyek pemerintah yang sedang berlangsung dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Penyerapan anggaran belanja pemerintah harus bisa dijalankan dengan maksimal dengan memperbaiki hal-hal yang mempengaruhinya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran, diantaranya adalah pengadaan barang/jasa, reformasi birokrasi, akuntabilitas publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Inkonsistensi hasil dan penelitian yang masih sedikit mendorong peneliti untuk meneliti kembali variabel-variabel tersebut. Selain itu, peneliti ingin menggunakan indikator pengukuran yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya berupa penilaian hasil evaluasi yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Birokrasi

Teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber menjadi salah satu teori utama yang dijadikan sebagai sebuah acuan dan memiliki pengaruh besar bagi badan birokrasi di tiap-tiap negara. Weber mengungkapkan bahwa segala aktivitas yang dijalankan oleh manusia pasti berlandaskan atas tujuan atau maksud tertentu dengan berbagai latar belakang (Setiyono, 2016:49). Tipe latar belakang kegiatan atau aksi yang dimaksud adalah *emosional action* (afektif), *traditional action*

(tradisional), *value-rational action* (nilai rasional), dan *instrumental rational action* (instrumental-rasional). Latar belakang tindakan tersebut memiliki sisi positif dan negatif bergantung pada suatu lingkungan birokrasi menyikapinya. Pada dasarnya birokrasi itu sendiri pasti memiliki potensi untuk mengandung penyakit *bureaupathology* (patologi birokrasi) yang berupa sifat impersonal, menjada media permainan politik, dan menyalahgunakan hukum atau aturan prosedur (Mbiri & Supriadi, 2021). Namun, jika tujuan sesungguhnya dari birokrasi dilaksanakan dengan baik dapat menciptakan sebuah organisasi yang lebih efektif, efisien, dan tersistematis. Tindakan yang dikemukakan dalam teori birokrasi ini sangat berpengaruh terhadap performa penyerapan anggaran.

Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan atau *institutional theory* merupakan sebuah teori yang mengungkapkan tentang bagaimana terbentuknya sebuah organisasi yang disebabkan dari tekanan lingkungan institusional sehingga menciptakan instusionalisasi (Robbins et al. dalam Akbar, 2022). Dalam pelaksanaannya, pembagian kekuasaan bagi lembaga negara sangat diperlukan untuk mencegah absolutisme yairu kekuasaan penuh tanpa kendali yang dapat memicu korupsi kekuasaan tanpa adanya pengawasan (Huda dalam Isnaeni, 2021). Di Indonesia, masing-masing Kementerian/Lembaga menjalankan *self assessment* sebagai bahan penilaian mandiri yang akan diawasi dan diperiksa oleh Kementerian/Lembaga lain yang diberikan wewenang.

Teori Stewardship

Teori *stewardship* merupakan sebuah teori yang berorientasi pada tingkah laku dan logika berpikir (Novianto & Firdaus, 2024). Teori ini memiliki konsep bahwa seorang pemimpin akan berperan sebagai *steward* (penjaga) dan bertanggung jawab atas pekerjaan dan sumber daya yang dikelola agar tetap digunakan untuk tujuan bersama bukan untuk keuntungan pribadi semata. Teori *stewardship* relatif lebih relevan jika diaplikasikan pada instansi pemerintahan atau sektor pelayanan publik lainnya yang merupakan organisasi non-profit karena pada lingkungan kerjanya motivasi sosial dan pelayanan publik yang menjadi tujuan utamanya (Schillemans & Bjurstrom, 2020). Penerapan teori *stewardship* dapat memberikan pengaruh positif pada penyerapan anggaran di instansi pemerintah.

Pengembangan Hipotesis

Pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien dinilai dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Sejalan dengan teori birokrasi terkait motif *instrumentally rational action* milik Weber yang menganggap tindakan dilakukan berdasarkan keinginan untuk mencapai sebuah tujuan yang target dan pengukurannya telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Yuliani (2022) dan Rahmawati & Ishak (2020) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Stigma pelaksanaan birokrasi tradisional yang sangat berkaitan erat dengan sistem hierarki dan terkesan kaku dianggap sudah kurang relevan terhadap sistem

tata kelola pemerintahan pada era *society* 5.0 ini. Hal ini sesuai dengan teori birokrasi *traditional action* yang menyatakan sistem yang kaku dan kurang fleksibel sudah tidak relevan sehingga diperlukan sebuah reformasi birokrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto (2014), Tambunan (2022), dan Syah (2023) yang menyatakan bahwa reformasi birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Reformasi birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Dalam teori birokrasi terkait *value-rational action*, tindakan yang diambil dalam lingkungan birokrasi berorientasi pada tujuan dan pencapaian yang realistis. Tindakan tersebut dapat berupa tindak keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan etika. Dengan adanya prinsip akuntabilitas publik, diharapkan dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang akan berdampak baik pula terhadap kinerja pemerintah terutama pengelolaan anggarannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novatiani (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah yang mana salah satu tolak ukur kinerja pemerintah adalah tingkat penyerapan anggarannya. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran

Teori *stewardship* mengungkapkan bahwa seorang pemimpin memiliki peran penting dalam pengendalian karena menjadi orang yang bertindak sebagai penjaga agar organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuannya. Efektivitas penyerapan anggaran dalam instansi pemerintahan dapat ditingkatkan melalui sistem pengendalian intern. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kennedy et al. (2020) dan Setiawan et al., (2022) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H4 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran

3. RESEARCH METHOD

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kementerian/Lembaga Negara di Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2022 & 2023. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Adapun dalam penelitian ini kriteria pemilihan sampel dijabarkan pada tabel 1.

Tabel 1. Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Populasi	84

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kementerian/Lembaga yang tidak menyediakan publikasi laporan keuangan	(5)
Jumlah Kementerian/Lembaga yang tidak terdapat pada penilaian LKPP, KemenpanRB, dan BPKP	(7)
Data <i>Outlier</i>	(5)
Jumlah sampel	67

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ialah data kuantitatif, yaitu serangkaian data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh menggunakan metode dokumentasi, yaitu sebuah metode yang menggunakan cara mengambil data dari suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah dipublikasikan.

Pengukuran Variabel

1. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja terhadap perencanaan anggaran pada suatu satuan kerja. Nilai penyerapan anggaran dapat diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Laporan Keuangan (LK) masing-masing Kementerian/Lembaga Negara Indonesia. Dalam penelitian ini, indikator penilaian untuk variabel penyerapan anggaran mengikuti PMK No.62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yaitu dengan rumus :

$$\text{Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

2. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa adalah serangkaian proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa dalam sebuah satuan kerja. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran pengadaan barang/jasa yang digunakan diperoleh dari nilai maturitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai dengan Peraturan LKPP No.10 Tahun 2021. Penilaian UKPBJ direfleksikan pada tingkatan level proaktif dengan rentang nilai 0 – 9.

Tabel 2. Nilai Indeks Maturitas UKPBJ

Nilai	Keterangan
9	Sangat Memuaskan
8	Memuaskan
7	Sangat Baik
6	Cukup Baik
5	Baik
4	Cukup
3	Rendah

Nilai	Keterangan
2	Cukup Rendah
1	Sangat Rendah
0	Sangat Amat Rendah

Sumber : Peraturan LKPP No.10 Tahun 2021

3. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pada lingkungan birokrasi. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran reformasi birokrasi yang digunakan adalah nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi sesuai dengan PermenPANRB No.26 Tahun 2020. Nilai evaluasi reformasi birokrasi tersebut dikategorikan menjadi 8 kelompok yang kemudian dikonversi dalam nilai sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kategori	Predikat	Nilai
AA	Sangat Memuaskan	8
A	Memuaskan	7
A-	Memuaskan dengan catatan	6
BB	Sangat Baik	5
B	Baik	4
CC	Cukup	3
C	Kurang	2
D	Sangat Kurang	1

Sumber : Diolah oleh Peneliti dari LAKIP PANRB

4. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik pada Kementerian/Lembaga merupakan pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan instansi tersebut terhadap publik atau masyarakat. Indikator pengukuran akuntabilitas publik diambil dari nilai akuntabilitas kinerja pemerintah yang terdiri atas nilai hasil evaluasi pelayanan publik dan Nilai Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan PermenPANRB No.29 Tahun 2022. Elaborasi kedua nilai tersebut menjadi sebuah penilaian akuntabilitas publik dirumuskan menjadi sebagai berikut :

$$Akuntabilitas\ Publik = \frac{Nilai\ Pelayanan\ Publik + Nilai\ SPBE}{2}$$

5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sebuah sistem untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan tata kelola organisasi pemerintah telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pada penelitian ini, indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur SPIP adalah nilai maturitas SPIP sesuai dengan Peraturan BPKP No.5 Tahun 2021. Hasil dari penilaian sistem pengendalian intern pemerintah dikategorikan menjadi 5 tingkatan, yaitu:

Tabel 4. Nilai Indeks Maturitas SPIP

Tingkatan	Keterangan	Skor
Level 5	Optimum	5
Level 4	Terkelola dan Terukur	4
Level 3	Cukup Baik	3
Level 2	Kurang	2
Level 1	Sangat Kurang	1

Sumber : Diolah oleh Peneliti dari LAKIP BPKP Tahun 2023

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis data deskriptif ini dapat menyajikan data berupa rata-rata, standar deviasi minimum maupun maksimum, dan varian dari variabel-variabel penelitian (Ghozali, 2018). Adapun variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan barang/jasa (X1), reformasi birokrasi (X2), akuntabilitas publik (X3), sistem pengendalian intern pemerintah (X4) dan penyerapan anggaran (Y).

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dilakukan menggunakan data pengamatan antar instansi (*cross section*). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan kerangka konseptual dan rumusan masalah yang telah dibahas pada penjelasan sebelumnya, yaitu:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu_0$$

Keterangan :

Y = Penyerapan anggaran

α = Konstanta

X1 = Pengadaan barang/jasa

X2 = Reformasi birokrasi

X3 = Akuntabilitas publik

β = Koefisien regresi masing-masing variabel independent

μ = *Error*

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat masalah-masalah asumsi klasik dalam sebuah model regresi linear (Mardiatmoko, 2020). Uji asumsi klasik ini digunakan untuk menjamin bahwa model regresi yang dianalisis memenuhi kriteria Bestlinear, Unbiased, dan Estimator (BLUE). Uji ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastistas.

4. Pengujian Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat signifikansi atas koefisien regresi yang didapatkan. Adapun pengujian hipotesis

penelitian terdiri atas uji t untuk melihat pengaruh dan signifikansi masing-masing variabel X terhadap variabel Y serta uji F (*goodness of fit*) untuk melihat kelayakan model yang digunakan dalam penelitian.

5. Analisis Koefisien Determinasi

Penggunaan analisis koefisien determinasi (R^2) adalah untuk melihat pengaruh yang timbul akibat variabel independen terhadap variabel dependen (Bimantara, 2022). Dengan mengukur koefisien determinasi, peneliti dapat mengetahui sejauh mana variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat.

4. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Data yang diperoleh dari proses pengambilan data melalui metode dokumentasi diolah menjadi bentuk statistik deskriptif pada tabel 5.

Tabel 5. Nilai Indeks Maturitas SPIP

	Pengadaan Barang/jasa (X1)	Reformasi Birokrasi (X2)	Akuntabilitas Publik (X3)	SPIP (X4)	Penyerapan Anggaran (Y)
<i>Mean</i>	5,537	5,597	3,922	2,955	97,740
<i>Median</i>	8,000	5,000	4,000	3,000	98,000
<i>Maximum</i>	9,000	7,000	5,000	4,000	100,000
<i>Minimum</i>	0,000	4,000	3,000	2,000	94,000
<i>Std. Dev.</i>	3,504	1,087	0,389	0,366	1,462
<i>Probability</i>	0,012	0,041	0,005	0,000	0,022

Sumber : *Output* Uji Statistik dengan Eviews

Berdasarkan hasil yang didapat dari pengolahan data menjadi statistik deskriptif sebagaimana ditampilkan pada tabel 5, dapat diidentifikasi:

1. Variabel Penyerapan Anggaran (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 97,740 dengan standar deviasi sebesar 1,462. Nilai tertinggi penyerapan anggaran yang diperoleh dari 67 sampel perwakilan dari total 84 Kementerian/Lembaga Negara di Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 100%. Sedangkan nilai terendah pada data penyerapan anggaran yang diolah adalah sebesar 94%.
2. Variabel Pengadaan Barang/Jasa (X1) memiliki rata-rata sebesar 5,537 dengan standar deviasi sebesar 3,504. Nilai tertinggi pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari sampel yang digunakan adalah 9 dan nilai terendahnya adalah 0.
3. Variabel Reformasi Birokrasi (X2) memiliki rata-rata sebesar 5,597 dengan standar deviasi sebesar 1,087. Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi tertinggi yang diperoleh dari sampel penelitian ini adalah 7 dan nilai terendahnya adalah 4.
4. Jumlah sampel yang melebihi nilai rata-rata adalah 25, sedangkan yang kurang dari rata-rata adalah 42.

4. Variabel Akuntabilitas Publik (X3) memiliki rata-rata sebesar 3,922 dengan standar deviasi sebesar 0,389. Nilai akuntabilitas publik tertinggi yang diperoleh dari sampel penelitian ini adalah 5 dan nilai terendahnya adalah 3. Jumlah sampel yang melebihi nilai rata-rata adalah 53, sedangkan yang kurang dari rata-rata adalah 14.
5. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X4) memiliki rata-rata sebesar 2,955 dengan standar deviasi sebesar 0,366. Nilai indeks maturitas SPIP tertinggi yang diperoleh dari sampel penelitian ini adalah 7 dan nilai terendahnya adalah 4. Jumlah sampel yang melebihi nilai rata-rata adalah 61, sedangkan yang kurang dari rata-rata adalah 6.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, maka dapat diperoleh persamaan regresi data sebagai berikut:

$$Y = 91.666 + -0.043X_1 + 0.181X_2 + 1.279X_3 + 0.095X_4 + e$$

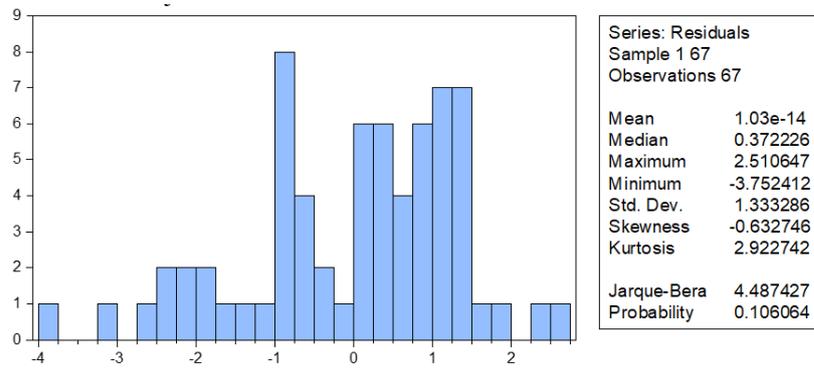
Dari hasil persamaan regresi linear berganda di atas, dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta C menunjukkan hasil 91,666 yang berarti jika variabel independen adalah 0, maka variabel penyerapan anggaran (Y) memiliki nilai sebesar 91,666.
2. Nilai Pengadaan Barang/Jasa (X1) sebesar -0,043 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% pada pengadaan barang/jasa akan diikuti dengan penurunan angka penyerapan anggaran sebesar 0.043%, dengan asumsi bahwa koefisien lainnya dianggap konstan atau setara dengan nilai 0.
3. Nilai Reformasi Birokrasi (X2) sebesar 0,181 menunjukkan bahwa setiap meningkatnya reformasi birokrasi sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan angka penyerapan anggaran sebesar 0,181% dengan asumsi koefisien lainnya dianggap konstan atau setara nilai 0.
4. Nilai Akuntabilitas Publik (X3) sebesar 1,279 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1% pada akuntabilitas publik akan berkontribusi pada peningkatan angka penyerapan anggaran sebesar 1,279% dengan asumsi bahwa koefisien lainnya dianggap konstan atau setara nilai 0.
5. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X4) sebesar 0,095 menunjukkan bahwa dalam setiap kenaikan 1% pada sistem pengendalian intern pemerintah akan berkontribusi pada peningkatan angka penyerapan anggaran sebesar 0,095% dengan asumsi bahwa koefisien lainnya dianggap konstan atau setara nilai 0.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan pertamakali pada sampel sejumlah 72 menunjukkan hasil bahwa data yang dimiliki tidak berdistribusi dengan normal karena nilai *Probability Jarque-Bera* (JB)<0,05. Peneliti menggunakan cara *outlier* data yang memiliki nilai jauh dengan data lain. Terdapat 5 data yang dikeluarkan karena terindikasi merupakan data outlier, sehingga sampel yang sebelumnya berjumlah 72 menjadi 67.



Sumber : *Output Uji Normalitas dengan Eviews*

Gambar 2. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai **Probability JB** > **alpha (0,05)**, yang memiliki arti bahwa data residual terdistribusi secara **normal**.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan korelasi antar variabel independent dalam suatu model regresi linear.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4.621	163.639	NA
X1	0.002	4.194	1.186
X2	0.037	43.161	1.548
X3	0.245	135.048	1.298
X4	0.222	69.687	1.040

Sumber : *Output Uji Multikolinearitas dengan Eviews*

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai *centered vif* seluruh variabel independen kurang dari 10 atau **centered vif** < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi **terbebas dari masalah multikolinearitas**.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan berupa adanya keterkaitan antar data *cross section* dalam sebuah model regresi.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.710	Prob. F(4,62)	0.159
Obs*R-squared	6.658	Prob. Chi-Square(4)	0.155
Scaled explained SS	5.481	Prob. Chi-Square(4)	0.241

Sumber : *Output Uji Heteroskedastisitas dengan Eviews*

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai **Prob. chi square** > 0,05 yaitu sebesar 0,1551. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji *Breusch Pagan Godfrey* yang telah dilakukan, data pada penelitian ini **terbebas dari masalah heteroskedastisitas**.

Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui nilai signifikansi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji ini dilakukan melalui pengamatan nilai *t-statistic* dan probabilitas pada model regresi (Pering, 2020).

Tabel 8. Hasil Uji t (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pengadaan Barang/Jasa (X1)	-0,043	0,052	-0,830	0,409
Reformasi Birokrasi (X2)	0,181	0,193	0,936	0,352
Akuntabilitas Publik (X3)	1,279	0,495	2,581	0,012
SPIP (X4)	0,095	0,471	0,203	0,839

Sumber : *Output* Uji t dengan *Eviews*

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan melalui perangkat lunak *eviews*, dapat disimpulkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa (X1)

Dari hasil uji t pada tabel 4.4, nilai *t-Statistic* yang diperoleh adalah -0,830 sedangkan *t-tabel* pada tingkat *alpha* 5% adalah 1,998 yang menunjukkan bahwa nilai *t-Statistic* lebih kecil daripada nilai *t-tabel*. Selain itu, nilai probabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,4093 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengadaan barang/jasa (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran (Y).

Reformasi Birokrasi (X2)

Dari hasil uji t pada tabel 4.4, nilai *t-Statistic* yang diperoleh adalah 0,936 sedangkan *t-tabel* pada tingkat *alpha* 5% adalah 1,998 yang menunjukkan bahwa nilai *t-Statistic* lebih kecil daripada nilai *t-tabel*. Selain itu, nilai probabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,3525 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Reformasi Birokrasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran (Y).

Akuntabilitas Publik (X3)

Dari hasil uji t pada tabel 4.4, nilai *t-Statistic* yang diperoleh adalah 2,581 sedangkan *t-tabel* pada tingkat *alpha* 5% adalah 1,998 yang menunjukkan bahwa nilai *t-Statistic* lebih besar daripada nilai *t-tabel*. Selain itu, nilai probabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,0122 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel

akuntabilitas publik (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran (Y).

SPIP (X4)

Dari hasil uji t pada tabel 4.4, nilai t-Statistic yang diperoleh adalah 0,203437 sedangkan t-tabel pada tingkat α 5% adalah 1,998 yang menunjukkan bahwa nilai t-Statistic lebih kecil daripada nilai t-tabel. Selain itu, nilai probabilitas yang diperoleh adalah sebesar $0,839 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran (Y).

2. Uji F

Tujuan dilakukannya uji F adalah untuk mengetahui seberapa baik model statistik yang dipilih untuk menguji data yang dipakai, maka dari itu uji ini sering disebut sebagai uji *goodness of fit* (Wardani & Permatasari, 2022).

Tabel 9. Hasil Uji F

F-statistic	3,155
Prob(F-statistic)	0,019

Sumber : *Output Uji F dengan Eviews*

Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan, diperoleh nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar 0,0199. Hal ini menunjukkan bahwa nilai **probabilitas (*F-statistic*) > 0,05** yang berarti **model yang dipilih layak untuk digunakan**.

Analisis Koefisien Determinasi

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh yang diberikan oleh variabel independent secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Kinasih & Kamaludin, 2022). Uji ini dilakukan dengan memperhatikan nilai hasil koefisien determinasi Adjusted R-squared. Nilai koefisien determinasi (R^2) dinilai memiliki rentang pengukuran antara nol hingga satu dan dapat dinyatakan dalam persamaan $0 < R^2 < 1$. Semakin tingginya nilai koefisien determinasi, maka semakin tinggi pula jumlah informasi yang dapat disediakan oleh variabel-variabel bebas untuk memprediksi variabel terikat.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0,169152
Adjusted R-squared	0,115549

Sumber : *Output Uji F dengan Eviews*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.6, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-squared adalah 0,115549. Hal ini berarti variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini berkontribusi sebesar 11,55% dalam memberikan pengaruh terhadap angka penyerapan anggaran.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis regresi pada penelitian ini, variabel pengadaan barang/jasa (X1) mendapatkan nilai t-Statistic sebesar -0,830 sedangkan t-tabel pada tingkat α 5% adalah 1,998 sehingga $t\text{-Statistic} < t\text{-tabel}$, dengan nilai probabilitas $0,409 > \alpha$ (0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa **pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran**. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puluala (2020) dan Anggita & Budi (2023) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Dalam teori birokrasi yang diungkapkan oleh Max Weber (1947) terdapat motif *instrumentally rational action* yang menjelaskan mengenai sebuah tindakan pada lingkungan birokrasi cenderung dilakukan atas dasar keinginan yang telah ditetapkan pengukurannya. Hal itu sesuai dengan konsep pengadaan barang/jasa yang proses bisnisnya telah diukur dan direncanakan setiap awal tahun anggaran. Namun, pada pelaksanaannya proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada lingkungan Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia tidak hanya terpaku dengan perencanaan dan pengukuran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, melainkan selalu disesuaikan dengan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini menyebabkan kemungkinan adanya variabel kontrol yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran yang tidak dimasukkan ke dalam analisis.

Selain itu, pada penelitian ini operasional variabel pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah indeks maturitas pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan LKPP No.10 Tahun 2021, sehingga pelaksanaan penilaian indeks ini masih tergolong baru diberlakukan. Dilihat dari data indeks maturitas yang diperoleh pada tahun 2023, masih terdapat beberapa Kementerian/Lembaga Negara yang memiliki nilai 0 akibat masih beradaptasi dengan poin penilaiannya. Hal ini mengakibatkan hasil pada penelitian ini belum maksimal karena indikatornya belum efektif. Perlu ada penelitian lanjutan mengenai hipotesis pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran menggunakan indikator pengukuran berupa indeks maturitas UKPBJ setelah pelaksanaannya efektif.

2. Pengaruh Reformasi Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis regresi pada penelitian ini, variabel reformasi birokrasi (X2) mendapatkan nilai t-Statistic sebesar 0,936 sedangkan t-tabel pada tingkat α 5% adalah 1,998 sehingga $t\text{-Statistic} < t\text{-tabel}$, dengan nilai probabilitas $0,3525 > \alpha$ (0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa **reformasi birokrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran**.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian PANRB tahun 2023, diungkapkan bahwa reformasi birokrasi merupakan rencana strategis jangka panjang untuk menciptakan sebuah tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian/Lembaga Negara di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem administrasi dalam jangka Panjang tersebut menjadi salah satu faktor belum terlihatnya dampak dari reformasi birokrasi terhadap penyerapan anggaran pada tahun penelitian ini. Implementasi dari reformasi seringkali memerlukan waktu untuk mencapai hasil nyata yang dapat terukur dari efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa reformasi birokrasi tidak secara langsung mempengaruhi penyerapan anggaran karena lebih memfokuskan pada efisiensi kerja, peningkatan kualitas, dan penguatan sistem birokasinya bukan pada pencapaian realisasi anggarannya.

Salah satu motif tindakan traditional action yang diungkapkan dalam teori birokrasi dianggap dapat menghambat penyerapan anggaran karena sistemnya terkesan kaku dan kurang fleksibel sehingga memerlukan sebuah reformasi pada lingkungan birokrasi. Dalam pelaksanaannya, ada atau tidaknya reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga Negara di Indonesia tidak mempengaruhi penyerapan anggaran karena pada akhirnya pemakaian anggaran akan dimaksimalkan sesuai dengan pagu anggaran yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran. Dengan adanya reformasi birokrasi, proses persetujuan memang menjadi lebih mudah tetapi tidak mempengaruhi besaran realisasi belanja yang dilakukan karena anggaran tersebut telah diatur dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dijadikan indikator penilaian pada penelitian ini terus mengalami amandemen terkait panduan pelaksanaan dan nilai pencapaiannya. Pada tahun 2023, terdapat kebijakan baru untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional serta untuk memastikan dampak reformasi birokrasi dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyesuaikan road map yang telah ditetapkan. Amandemen yang baru dilakukan pada tahun berjalan memungkinkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari reformasi birokrasi terhadap penyerapan anggaran karena penilaian yang diambil belum berlaku secara efektif.

3. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis regresi pada penelitian ini, variabel akuntabilitas publik (X3) mendapatkan nilai t-Statistic sebesar 2,581 sedangkan t-tabel pada tingkat α 5% adalah 1,998 sehingga $t\text{-Statistic} > t\text{-tabel}$, dengan nilai probabilitas $0,0122 < \alpha$ (0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa **akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran**. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustinus (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviantani (2019) yang menyatakan bahwa

akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah yang mana salah satu tolak ukurnya adalah penyerapan anggaran.

Akuntabilitas publik merujuk pada pertanggungjawaban, transparansi, dan keterbukaan informasi terhadap publik atau masyarakat terkait pengelolaan anggaran. Semakin tingginya akuntabilitas publik mencerminkan semakin baiknya tata kelola pemerintahan yang diterapkan sehingga dapat mendorong efektivitas penyerapan anggaran. Adanya pertanggungjawaban terhadap publik dapat memastikan alokasi dana digunakan sesuai kebutuhan dan mencegah terjadinya penundaan ataupun penyalahgunaan anggaran.

Sejalan dengan teori birokrasi terkait value-rational action, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan berorientasi pada tujuan dan pencapaian yang realistis. Tindakan tersebut memiliki kaitan erat dengan transparansi dan tanggung jawab terhadap publik karena dianggap dapat memastikan anggaran terserap sesuai dengan perencanaan dan tujuan penganggarnya. Transparansi publik dapat mengurangi risiko penyimpangan dan memastikan agar anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kementerian/Lembaga Negara di Indonesia saat ini sedang menggencarkan sebuah sistem untuk meningkatkan transparansi publik yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem tersebut dievaluasi melalui sebuah penilaian yang menjadi salah satu unsur indikator pengukuran akuntabilitas publik bersama dengan penilaian pelayanan publik. Dengan adanya evaluasi atau penilaian, masing-masing Kementerian/Lembaga menjadi semakin memaksimalkan kualitas pelayanan publik dan SPBE tersebut sehingga pengelolaan anggaran yang dilakukan juga semakin maksimal. Terlebih ketika pemerintah memiliki sistem akuntabilitas yang baik akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap proses anggaran dan mencegah adanya intervensi negatif yang dapat menghambat penyerapan anggaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas publik maka semakin tinggi pula penyerapan anggarannya.

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis regresi pada penelitian ini, variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X4) mendapatkan nilai t-Statistic sebesar 0,203 sedangkan t-tabel pada tingkat α 5% adalah 1,998 sehingga t-Statistic < t-tabel, dengan nilai probabilitas $0,8395 > \alpha$ (0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa **sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran**. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sutono et al., 2022).

Pada pelaksanaannya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak memiliki hubungan langsung dengan penyerapan anggaran karena lebih berfokus pada fungsi pengawasan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan. Selain itu, implementasi dari sistem pengendalian intern di Kementerian dan Lembaga Indonesia masih belum optimal sehingga dampaknya terhadap penyerapan anggaran tidak akan terlihat secara signifikan. Hal ini dapat dilihat pada

statistik deskriptif, tidak ada Kementerian/Lembaga yang memiliki nilai maturitas SPIP maksimal yaitu 5 (lima). Nilai maturitas yang diperoleh masing-masing Kementerian/Lembaga juga tidak jauh berbeda sehingga dampak yang dihasilkan terhadap penyerapan anggaran kurang terlihat. Penerapan SPIP pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia yang belum berjalan dengan maksimal diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan komitmen dari pimpinan maupun pegawai mengenai pentingnya SPIP dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Selain itu, belum ada integrasi antara SPIP dengan proses tata laksana yang sebenarnya seperti perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran.

Belum optimalnya penerapan SPIP di lingkungan Kementerian bertolak belakang dengan teori *stewardship* yang mana seorang pemimpin atau dalam konteks ini adalah pengendali seharusnya memiliki peran sebagai penjaga (*steward*) agar SPIP dapat diimplementasikan secara efektif, tetapi pada pelaksanaannya belum demikian. Hal ini tentu berdampak pada penyerapan anggaran karena kurangnya pengawasan dalam mengelola anggaran sehingga menjadi tidak maksimal.

5. KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengadaan barang/jasa, reformasi birokrasi, akuntabilitas publik, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga di Indonesia tahun 2023. Sampel yang digunakan terdiri atas 67 Kementerian/Lembaga Negara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
2. Reformasi Birokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
3. Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
5. Pengadaan Barang/Jasa, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berkontribusi sebesar 11,55% pada peningkatan atau penurunan angka penyerapan anggaran.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk membantu menginterpretasikan hasil temuan, yaitu:

1. Objek pada penelitian ini hanya terbatas pada data tahun 2023, sehingga belum menggambarkan keseluruhan bagaimana pengaruh pengadaan barang/jasa,

reformasi birokrasi, akuntabilitas publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap penyerapan anggaran.

2. Indikator pengukuran yang digunakan pada penelitian ini merupakan sebuah peraturan yang ditetapkan kurang dari 3 tahun yang mana belum dapat dikatakan efektif sehingga bisa mempengaruhi hasil dari penelitian.
3. Variabel independen dalam penelitian ini hanya meliputi 4 variabel yaitu pengadaan barang/jasa, reformasi birokrasi, akuntabilitas publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga belum menunjukkan keseluruhan aspek yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pada penelitian ini, berikut rekomendasi untuk peneliti selanjutnya :

1. Untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran disarankan agar mempertimbangkan variabel-variabel tambahan diluar variabel pada penelitian ini seperti Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Anggaran.
2. Peneliti yang tertarik untuk meneliti dengan variabel pengadaan barang/jasa dan reformasi birokrasi dengan indikator peraturan yang ditetapkan sebaiknya melakukan penelitian ketika peraturan telah berjalan dengan efektif yaitu setelah 5 tahun diberlakukan, sehingga menambah keabsahan hasil penelitian.
3. Menambahkan variabel kontrol atau variabel moderasi untuk melihat bagaimana pengaruh pengadaan barang/jasa, reformasi birokrasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah setelah ditambahkan variabel kontrol atau moderasi tersebut.

REFERENCES

- Abdi, N. F., & Nursari, S. C. (2022). Pengujian Black Box pada Website dengan Metode Robustness Testing. *Journal of Informatics and Advances Computing*, 93-96.
- Akbar, D. (2022). Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Isomorfisme Institusional: Penguatan Kelembagaan dalam Penegakan Etika Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Batam. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 100-108.
- Anggita, M. S., & Budi, Y. A. B. (2023). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1339-1350.
- Azzahra, S., Srivani, M., Rizky, B., & Sufiawan, N. A. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK), Tenaga Kerja IMK, dan Pendapatan IMK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2010-2020. *Indonesian Research Journal on Education*, 445-456.
- Bimantara, Y. (2022). Pengaruh Harga, Desain Produk Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pada Konsumen Mobil Honda Brio Di Lampung). *Journal Strategy of Management and Accounting Through Research and Technology*, 27-36.
- Dewi, I. G. (2021). Mendiskusikan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian dalam Penyusunan Disertasi: Sebuah Kajian Teoritis. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 31-39.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan Implikasi dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 97-110.
- Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 108–117.
- Kinasih, D., & Kamaludin, N. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan pada Koperasi Primkopal Lanal Tegal. *Review of Applied Accounting Research*, 27-36.
- Kuntadi, C., Adi Nugroho, D., & Author, C. 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang Dan Jasa Serta Partisipasi Anggaran. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 332-337.
- Lamaya, fauziyah, & Mei, N. N. (2021). Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Akuntansi (Ja)*, 8(2), 43–49.

- Lestari, L., & Yuliani, N. L. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa Dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja. *The 5th FEBENEFECIUM*, 648-662.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik pada Analisis Regresi Linear Berganda. *Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 333-342.
- Mbiri, A. D., & Supriadi, D. (2021). Relevansi Birokrasi Rational Weber dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Kabupaten Belu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 588-592.
- Mulyanto, K. C. U. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai, Reformasi Birokrasi, dan Disiplin Kerja terhadap Motivasi dan Penyerapan Anggaran. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 14(1), 80160.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(01).
- Novianto, W., & Firdaus, F. (2024). Teori Corporate Governance: Keterbatasan, Kritik dan Alternatif. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1568-1574.
- Nugroho, R. A., Mahfud, I., & Jubaedi, A. (2022). Pengaruh Latihan Shuttle Run Terhadap VO2MAX Peserta Ekstrakurikuler Bulutangkis. *Sport Science & Education Journal*, 13-20.
- Nurchahya, W. A., Arisanti, N. P., & Hanandhika, A. N. (2024). Penerapan Uji Asumsi Klasik Untuk Mendeteksi Kesalahan Pada Data Sebagai Upaya Menghindari Pelanggaran Pada Asumsi Klasik. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 472-481.
- Pering, I. M. (2020). Kajian Analisis Jalur dengan Structural Equation Modeling (SEM). *Jurnal Satyagraha*, 28-48.
- Puluala, M. G. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(1), 1-9.
- Purwohedi, U. (2022). *Metode Penelitian Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor “Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180-189.
- Safpremi, Y., & Putri, A. M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 188-199.
- Schillemans, T., & Bjurström, K. H. (2020). Trust and verification: Balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650-676.

- Selly, L. J., Setiawan, T., & Harianto, D. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitability, Millennial Leadership, Family Ownership, dan Firm Size terhadap Firm Value. *Journal of Business and Applied Management*, 35-48.
- Setiawan, H. (2022). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Tebing Tinggi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Tebing Tinggi). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(3), 425-445.
- Setiyono, B. (2016). *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sulistiyowati, H., Putri, Y. A., & Kusuma, I. L. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 1-8.
- Sutono, D. P., Respati, N. W., & Safrida, L. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Satker Pusat di Daerah Lingkup Kemenlhk. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 135-144.
- Syah, A. F. (2023). Implementation of New Public Management in improving bureaucracy reform in the public services sector in government agencies. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*, 2(2), 129-141.
- Tambunan, B. H. (2022). Analysis of the Schedule of Budget Implementation, Organizational Commitment, and Bureaucratic Reforms on Budget Absorption in the North Tapanuli Regency Government. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(2), 230-242.